

# PLURAL SOCIAL CAPITAL SEBAGAI BASIS SISTEM MANAJEMEN KETAHANAN HAYATI

Tonny D. Pariela

*Plural Social Capital can be defined as the social relationships between groups with different identities within a single community, which act to strengthen the socialties as a community. The process of developing a community identity is described through preserved social capital using the case study of the village of Wayame. The role of plural social capital in community biosecurity management systems is discussed.*

**Keywords:** Modal sosial, Kelestarian lingkungan, Ketahanan hayati

## **Pendahuluan: Tentang Plural Social Capital**

Modal sosial merupakan salah satu konsep yang dewasa ini dipandang penting dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu masyarakat baik sebagai suatu bangsa (*nation*) maupun komunitas (*community*). Gagasan dasar di dalam konsep ini adalah *investment in social relations with expected returns* (Lin, Cook, and Burt (eds), 2001: 6).

Untuk memahami modal sosial di mana gagasan dasar tersebut tercapuk di dalamnya, telah dirumuskan sejumlah definisi tentang modal sosial yang secara substantif tidak terlalu mengandung perbedaan di antara satu dengan yang lainnya<sup>1</sup>. Putnam misalnya mendefinisikan modal sosial sebagai ... *features of social organisation such as trust, norms, and networks that*

*can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions (Productivity Commission<sup>2</sup>, 2003: 8). Pandangan yang relatif sama dikemukakan oleh Woolcock dan Narayan, yang mengatakan *social capital refers to the norms and networks that enable people to act collectively* (Callois and Angeon, 2004:3). Begitu pula dengan Lang dan Hornburg (1998:4), yang memaknai modal sosial sebagai ... *commonly refers to the stocks of social trust, norms, and networks that people can draw upon in order to solve common problems.**

Merujuk pada gagasan dasar dalam modal sosial sebagaimana dikemukakan di atas, secara tersirat tampak bahwa interaksi sosial memiliki fungsi yang sangat penting guna membentuk indikator-indikator modal sosial seperti *trust*, norma-norma sosial dan jejaring. Adanya interaksi sosial menyebabkan tumbuhnya relasi-

<sup>1</sup> Definisi tentang modal sosial cukup banyak dikemukakan dengan berbagai perspektif. Lihat Callois and Angeon (2004: 3); Kearns (2004:6); *Productivity Commission* (2003: 8); *Policy Research Initiative* (June 2003: 7); Serageldin and Grootaert (1999: 46); Grootaert (April 1998: 2); Rose (1998: 3).

<sup>2</sup> *Productivity Commission* adalah sebuah lembaga independen di Australia yang berfungsi sebagai penasehat resmi Pemerintah Australia dalam kebijakan mikro-ekonomi dan regulasi.

relasi sosial antar individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok, sehingga pada gilirannya membentuk jejaring di dalam mana *trust* memperoleh ruang dan peluang untuk berkembang berdasarkan norma-norma sebagai jaminan stabilitas di dalam masyarakat. Dengan kata lain, jejaring-jejaring berfungsi menghubungkan orang-orang di dalam masyarakat dalam rangka tindakan bersama; norma-norma dan nilai-nilai sosial menjadi pengikat di dalam jejaring dimaksud; sementara *trust* merupakan sumber sekaligus hasil dari modal sosial yang mendukung kerjasama sosial (Kearns, 2004: 6). Ini berarti bahwa sanksi sosial sebagai bagian integral dari norma-norma sosial merupakan aspek lain yang juga terkait di dalam manifestasi modal sosial, sebab dengannya maka berbagai perilaku menyimpang yang potensial mengancam stabilitas struktur sosial dapat dikontrol.

Modal sosial hakikatnya merupakan sumberdaya yang terletak di dalam struktur sosial (Pantoja, March 2000: 17; Coleman dalam Dasgupta dan Serageldin, 1999: 16), dan oleh karena itu dapat diakses atau dimobilisasi secara sengaja (Callois and Angeon, 2004: 3; Lin, Cook, and Burt (eds), 2001: 12). Sebagai realitas di dalam suatu struktur sosial, modal sosial tercermin dari relasi-relasi sosial yang berkembang di dalam kelompok berbasis identitas asal (suku, agama, ras, antar golongan) yang sama dan memperkuat ikatan-ikatan di dalam kelompok yang bersangkutan – lazim disebut *bonding social capital*; relasi-relasi sosial antar kelompok berbeda identitas asal yang cenderung memperkuat ikatan di antara kelompok-kelompok yang berbeda identitas asal tersebut, disebut *bridging social capital*; serta relasi-relasi sosial antar individu-individu dan kelompok-kelompok dalam strata sosial yang berbeda secara hierarkhis – disebut *linking social capital* (Kearns, 2004: 7; Commission Research Paper, 2003: 16). Menacermati ketiga tipe modal sosial ini, tampak bahwa masyarakat seakan-

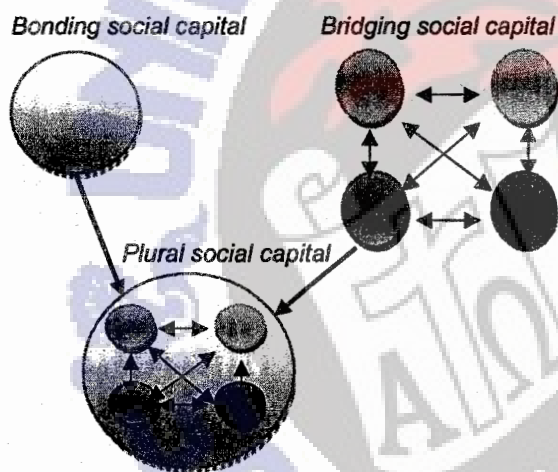
akan ditempatkan di dalam ruang (*social space*) tanpa batas-batas teritorial, sehingga agak sulit digunakan untuk memahami realitas sosial di dalam suatu komunitas yang dihuni oleh masyarakat majemuk. Padahal di lain pihak, kenyataan menunjukkan bahwa cukup banyak dijumpai realitas masyarakat dengan latar belakang yang berbeda hidup bersama-sama dan saling berinteraksi secara inklusif baik pada aras komunitas hingga negara bangsa (nasional).

Dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan di Desa Wayame<sup>3</sup> tahun 2007, dijumpai fakta bahwa di dalam realitas kemajemukan masyarakat desa tersebut, mereka membangun identifikasi diri sebagai satu komunitas dalam ikatan teritorial desa yang berbeda dengan komunitas lainnya. Artinya, mereka membentuk identifikasi diri sebagai orang Wayame yang diposisikan berbeda dengan orang atau komunitas lainnya. Hal ini memang dengan sengaja dilakukan mereka untuk merespons situasi krisis (baca: konflik Maluku) yang sementara dihadapi dalam rangka mempertahankan keutuhan eksistensi sebagai satu komunitas. Dalam konteks ini, modal sosial yang lazim berada di bawah tekanan situasional ketika suatu masyarakat menghadapi krisis, dicoba untuk dipelihara dan diawetkan (*preserved social capital*) agar pada saatnya bisa digunakan untuk menghadapi perubahan lingkungan sosial (yang sering terjadi dengan tiba-tiba) akibat krisis dimaksud.

Proses identifikasi diri sebagai suatu komunitas, dapat dikatakan tidak terjadi dengan serta merta (tiba-tiba), tetapi melalui intervensi yang dilakukan secara sengaja terutama oleh *creative minority* (meminjam istilah Arnold Toynbee) yang disebut mereka Tim 20 Wayame. Dengan memanfaatkan inklusivitas relasi-relasi sosial yang telah ada sebelum konflik Maluku, tim ini kemudian berperan

<sup>3</sup> Desa Wayame berjarak 29 kilometer dan terletak di sebelah Utara dari pusat Kota Ambon.

untuk membangun kembali, memelihara dan mengembangkan jejaring baik di dalam desa maupun antar desa bertetangga, dan berusaha memperkuat *trust* di dalam jejaring yang bersangkutan atas dasar kesepakatan-kesepakatan sosial (norma-norma sosial) yang dibentuk bersama-sama masyarakat. Melalui proses-proses sosial asosiatif yang dilalui bersama dengan masyarakat secara partisipatif, maka perlahan-lahan terjadilah proses deterritorialisasi suku dan deterritorialisasi agama menjadi teritorialisasi komunitas, sehingga terbentuk wilayah modal sosial baru yang dapat disebut sebagai *plural social capital* (PSC), yang sama sekali tidak menghilangkan ciri dasar dari perbedaan identitas asal di dalam komunitas Wayame.



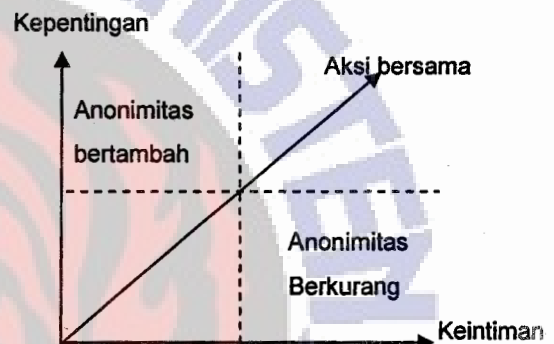
**Gambar 1**  
**Plural Social Capital**

Berdasarkan konteks di atas, maka PSC dapat didefinisikan sebagai relasi-relasi sosial antar kelompok yang berbeda identitas asal di dalam suatu komunitas, yang memperkuat ikatan-ikatan sosial sebagai suatu komunitas (Pariela, 2008: 236).

### **PSC dan Aksi Bersama (Collective actions)**

Berger dan Luckmann (1967) menjelaskan bahwa derajat *anonymity* tergantung pada derajat kepentingan (*interest*) dan derajat keintiman

(*intimacy*). Menurut mereka, ... *the degree of interest and the degree of intimacy may combine to increase or decrease anonymity of experience* (Berger and Luckmann, 1967: 33). Merujuk pada hasil penelitian yang saya lakukan di Desa Wayame, maka dalam konteks modal sosial sebagai basis yang menggerakkan aksi bersama (partisipasi dan kerjasama di dalam masyarakat), konsep *anonymity* yang dikemukakan Berger dan Luckmann di atas bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui bagaimana aksi bersama dimaksud memperoleh momentum untuk beroperasi.



**Gambar 2**  
**Hubungan antara Anonimitas dan Aksi Bersama**

Seperti telah dikonstatasi sebelumnya bahwa identifikasi diri suatu masyarakat yang terikat dalam teritorial komunitas, tidak terlepas dari interpretasi realitas objektif<sup>4</sup> melalui interaksi sosial yang pada gilirannya mendorong aksi kolektif berupa kerjasama di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidup bersama. Ini merupakan *the reality of everyday life* yang dimaknai oleh Berger dan Luckmann (1967:23) sebagai *intersubjective world; a world that I share with other*. Dalam kaitan ini, maka semakin besar derajat kepentingan dan

<sup>4</sup> Interpretasi realitas objektif (*perceived reality*) dapat diartikan sebagai proses pemaknaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam masyarakat terhadap kondisi kehidupan bersama yang sementara dialami.

keintiman, akan semakin besar pula dorongan untuk melakukan aksi bersama. Di satu pihak, apabila derajat kepentingan lebih besar dibandingkan dengan derajat keintiman, maka akan tercipta jarak sosial (*social distance*) yang cukup jauh atau *radius of trust* yang cukup luas sehingga potensial melahirkan ketegangan dan konflik di dalam masyarakat; di lain pihak, bila mana derajat keintiman lebih tinggi dibandingkan derajat kepentingan, maka masyarakat akan memiliki jarak sosial yang kecil tetapi cenderung bersifat apatis karena tidak mempunyai kepentingan bersama yang akan mendorong mereka untuk bekerjasama. Dengan demikian maka di dalam menghadapi situasi krisis, diperlukan adanya keseimbangan di antara derajat kepentingan dan keintiman di dalam masyarakat (Pariela, 2008: 238). Melalui keseimbangan inilah, masyarakat memiliki cukup energi sosial yang akan merangsang dan mendorong mereka untuk bekerjasama menghadapi situasi krisis dimaksud. Di sinilah sebetulnya, menurut hemat saya, terletak makna penting dari apa yang lazim disebut sebagai *communal engagement* yang bertumpu pada modal sosial di dalam masyarakat sebagai basis *survival strategy* mereka menghadapi tekanan situasi krisis.

### **PSC sebagai Basis Sistem Manajemen Ketahanan Hayati**

Bisakah PSC dijadikan sebagai basis bagi pengembangan sistem manajemen ketahanan hayati? Andai-kan ada korelasi di antara keduanya, apakah kontribusi PSC bagi pengembangan sistem manajemen dimaksud? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial, yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam rangka memahami pentingnya PSC sebagai bagian integral dari sistem manajemen ketahanan hayati (SMKH).

Masyarakat terutama pada aras komunitas (khususnya komunitas tradisional di perdesaan) diyakini selalu memiliki mekanisme tertentu yang digunakan untuk memelihara keseim-

bangun lingkungan hidupnya, baik dalam konteks lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Secara antropologis, mekanisme demikian lazim dipandang mencerminkan rasional tersembunyi (*hidden rationality*) sebagai kearifan lokal (*local wisdom*), atau wujud dari *traditional knowledge*. Kenyataan ini telah disadari lama oleh kalangan sosiolog dan terutama antropolog sebagai kekuatan masyarakat tradisional yang adaptif dengan - atau fungsional terhadap kelestarian lingkungan hidup termasuk sebagai strategi ketahanan hayatinya. Perlakuan mereka terhadap lingkungan hidup, hakikatnya mencerminkan pemaknaan subjektif yang umumnya bersumber dari: (a) pengalaman berinteraksi dengan lingkungan (pengalaman sosio-ekologis), dan (b) pengalaman spiritual sebagai warisan leluhur (pengalaman kultural ekologis).

Seiring dengan dinamika masyarakat dalam arus perubahan sosial budaya dewasa ini, pengetahuan tradisional yang terbentuk sebagai implikasi dari akumulasi pengalaman sosio-ekologis dan pengalaman kultural ekologis, secara perlahan-lahan mengalami degradasi dan mulai digantikan oleh seperangkat pengetahuan baru yang seringkali tidak cukup diakrabi masyarakat. Masalah ini belum termasuk pengaruh proses pembangunan yang memperkenalkan "ideologi" ekonomi uang (penetrasi kapitalisme) hingga ke wilayah perdesaan yang merubah struktur kognitif masyarakat tradisional. Akibatnya masyarakat mengalami proses alienasi dan juga anomie terhadap lingkungan hidupnya, karena berbagai institusi lokal yang semula berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) menjadi lumpuh. Kondisi ini potensial menimbulkan ketegangan dan konflik baik di dalam komunitas, antar komunitas, maupun antara komunitas dengan pemerintah daerah dan atau kalangan swasta; ketegangan dan konflik mana pada dasarnya dapat berdampak negatif yang serius terhadap SMKH.

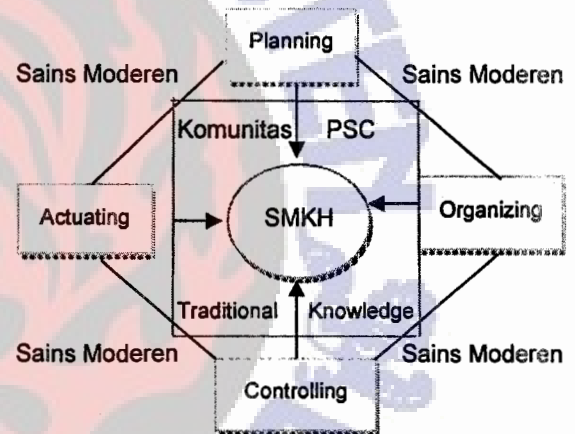
Bertolak dari apa yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa

masyarakat sebagai suatu komunitas menempati kedudukan penting dan mempunyai peran strategis dalam aktivitas bersama menghadapi situasi krisis termasuk menghadapi ancaman hama dan penyakit. Aktivitas bersama dimaksud seyogianya bukan merupakan hasil dari sebuah proses mobilisasi seperti yang lazim dialami di Indonesia dalam periode kepemimpinan Orde Baru, tetapi atas dasar kerjasama dan partisipasi yang tumbuh dan berkembang karena ada kesadaran bersama di dalam masyarakat khususnya terhadap situasi ancaman yang sementara atau akan dihadapi. Dengan demikian kesadaran bersama ini akan mencerminkan *perceived reality* yang memposisikan ancaman hama dan penyakit sebagai "musuh bersama" (*common enemy*).

Falk, *et. al.*, mengutip Plant Health Australia (2005), menjelaskan ketahanan hayati tanaman sebagai ... sebuah patokan yang didesain untuk melindungi hasil panen dari serangan hama dan penyakit di pertanian tingkat nasional, regional dan individu<sup>5</sup>. Pandangan ini mencerminkan adanya rekayasa sistem yang dilakukan secara sengaja (didesain) sebagai instrumen untuk menghadapi serangan hama dan penyakit. Dalam konteks rekayasa inilah diperlukan pendekatan yang tepat agar substansi yang mengandung instrumen dimaksud bisa diadopsi dan diadaptasi oleh masyarakat tanpa mereka harus merasa terasing dengan pengetahuan baru yang diperkenalkan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana mengkombinasikan gagasan-gagasan pengetahuan moderen dengan pengetahuan tradisional yang sebelumnya sudah dimiliki masyarakat?

Pengalaman sosio-ekologis dan pengalaman kultural ekologis yang membentuk pengetahuan tradisional masyarakat semestinya dijadikan sebagai basis bagi pengembangan pengetahuan atau sains moderen dalam

kerangka SMKH. Dengan kata lain, pengetahuan baru yang diintroduksi seyogianya merupakan hasil kombinasi dengan pengetahuan tradisional. Gagasan ini dikemukakan dengan asumsi bahwa masyarakat tidak pernah berada di dalam ruang vakum pengetahuan, dan mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan pengetahuan baru yang diperoleh. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak akan mengalami alienasi atau anomie terhadap lingkungan hidupnya; sebaliknya, energi sosial yang ada bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan menghadapi ancaman hama dan penyakit. Secara skematis, gagasan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3**  
PSC dan Sistem Pengetahuan dalam SMKH

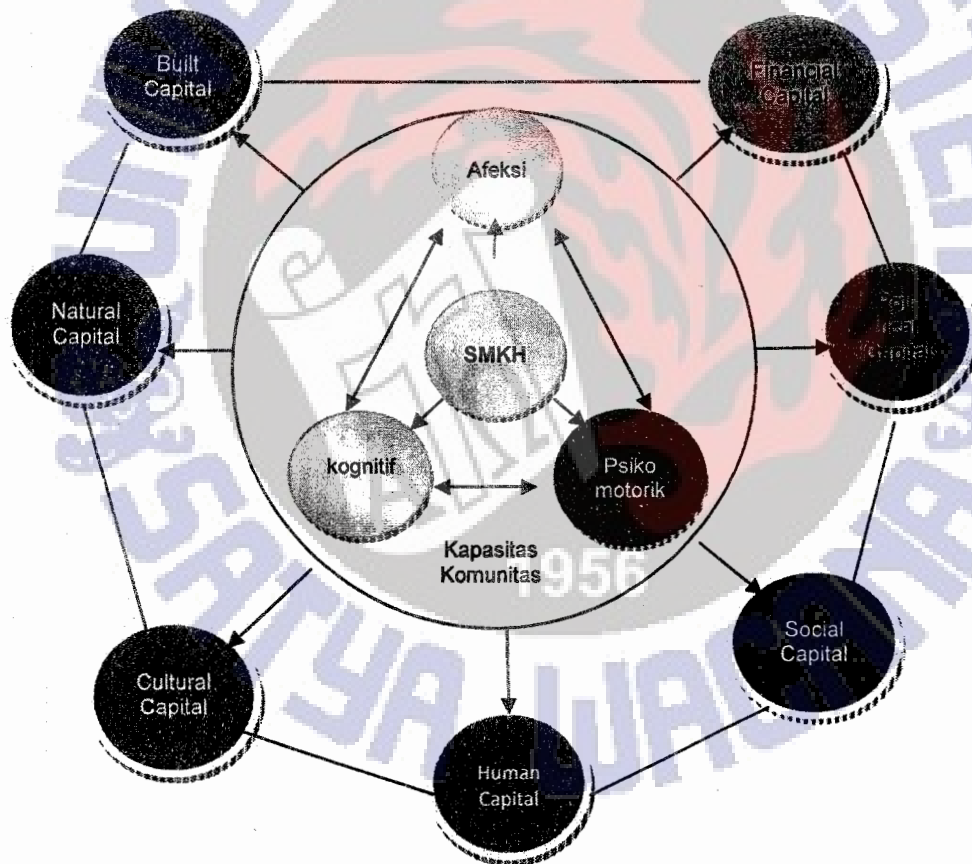
Artikel yang ditulis oleh Cornelia B. Flora, Michael Christie, Sang Putu Kaler Surata, Paul Royce, Eka Martiningsih, Bronwyn Myers, serta Wayan Mudita dan Remi Natonis<sup>6</sup>, baik secara implisit maupun eksplisit telah menunjukkan profil komunitas yang memiliki pengetahuan tradisional sebagai kekuatan untuk mengkonsolidasi diri menghadapi situasi apa pun termasuk potensi ancaman serangan hama dan penyakit. Persoalannya adalah bagaimana membantu masyarakat

<sup>5</sup>Dalam Kritis - Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Edisi Khusus Biosecurity.

<sup>6</sup>Dalam Kritis - Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Edisi Khusus Biosecurity.

untuk mengorganisasikan perangkat pengetahuan tradisional mereka agar berkemampuan efektif dalam menghadapi situasi krisis tanpa mendistorsi keseimbangan lingkungan sosial mereka? Dalam kaitan ini, maka semua modal masyarakat yang ada dan hidup di dalam komunitas maupun antar komunitas seperti dijelaskan oleh Cornelia B. Flora<sup>7</sup>, seyogianya dijadikan sebagai kekuatan yang bersinergi satu dengan lainnya guna membentuk kapasitas masyarakat baik dalam kerangka pengembangan PSC maupun ketrampilan teknis menghadapi tekanan situasi krisis seperti ancaman hama dan penyakit.

selamanya mencerminkan perbedaan identitas asal saja, tetapi juga bisa dielaborasi sehubungan perbedaan strata dengan berbagai sumbernya (kultural (adat) dan latar belakang sosial ekonomi masyarakat). Intinya adalah bagaimana perbedaan yang dilatarbelakangi oleh aspek kultural dan sosio-ekonomi di dalam komunitas dapat dikelola melalui suatu mekanisme sosial yang *built-in* di dalam struktur sosial, sehingga terwujud kesamaan persepsi, partisipasi dan kerjasama di dalam komunitas dan antar komunitas bertetangga. Dengan demikian maka seluruh modal masyarakat baik yang terdapat di dalam diri



**Gambar 4**  
**Modal Masyarakat dan Pengembangan**  
**Kapasitas Masyarakat**

Merujuk pada berbagai teori Sosiologi khususnya tentang stratifikasi sosial di dalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa PSC tidak

individu maupun di luar (struktur sosial) bisa diintegrasikan secara terpadu bagi kepentingan stabilitas sosial dan keamanan di dalam komunitas maupun relasi-relasi sosial antar komunitas bertetangga. Hal ini merupakan

<sup>7</sup> Ibid.

prasyarat kondisional yang sangat diperlukan bagi pengembangan SMKH berbasis masyarakat. Soalnya adalah bagaimana proses-proses sosial yang asosiatif dengan didukung oleh semangat partisipasi dan kerjasama dalam mengembangkan SMKH yang adaptif dengan - dan fungsional terhadap realitas kebutuhan objektif dapat menyentuh dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psiko-motorik masyarakat. Pengetahuan masyarakat (dimensi kognitif) disertai pertimbangan moral (dimensi afektif) di dalam suatu kesamaan persepsi tentang lingkungan hidup mereka, akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan bekerja bersama-sama (dimensi psikomotorik) dalam kerangka SMKH.

## Penutup

Modal masyarakat, secara khusus modal sosial merupakan salah satu kekuatan yang diperlukan masyarakat dalam rangka menghadapi tekanan situasi krisis. Modal sosial terutama *plural social capital* pada gilirannya menjadi prasyarat kondisional bagi penguatan kohesi sosial atas dasar kesamaan persepsi terhadap kondisi yang sementara atau akan dihadapi sehingga dapat menggerakkan aksi bersama.

Untuk dapat mengakses modal sosial sebagai sumberdaya atau energi yang tersimpan di dalam struktur sosial, maka dibutuhkan intervensi penguatan kapasitas masyarakat melalui pengenalan pengetahuan yang *appropriate* (pengembangan pengetahuan baru berbasis *traditional knowledge*). Dengan demikian masyarakat setempat (komunitas) akan memiliki cukup kemampuan yang responsif dan antisipatif terhadap tantangan situasional yang dihadapi.

## Kepustakaan

Berger, Peter L and Thomas Luckmann. 1967, *The Social Construction of Reality - A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York Anchor Books Doubleday & Company, Inc.

Callois, J. M and V. Angeon. 2004, *on the Role of Social Capital on Local Economic Development - An Econometric Investigation on Rural Employment Areas in France*, AES Conference 2004, <http://www.aes.org/events/25>, download Nopember 2005.

Coleman, James S, *Social Capital in the Creation of Human Capital* dalam Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin. 1999, *Social Capital - A Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washington D.C.

Commission Research paper. 2003, *Social Capital: Reviewing the Concept and Its Policy Implications*, Commonwealth of Australia.

Grootaert, Christian. April 1998, *Social Capital: The Missing Link?*, The World Bank Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, Social Capital Initiative, Working Paper No. 3.

Kritis - Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplen, Edisi Khusus *Biosecurity*, A co-publication between Learning Communities: International Journal of Learning Social Contexts (Australia) & Kritis: Journal of Interdisciplinary development studies (Indonesia).

Kearns, P. 2004, *VET and Social Capital: A Paper on the Contribution of the VET sector to Social Capital in Communities*, <http://www.never.edu.au/publication/1484.html>, down-load Januari 2006.

Lang, R. E and Steven P. Hornburg. 1998, *What Is Social Capital and Why Is It Important to Public Policy*, Housing Policy Debate, Volume 9, Issue 1, Fannie Mae Foundation, [http://www.fanniemaefoundation.org/programs/hpd/pdf\\_0901\\_edintro.pdf](http://www.fanniemaefoundation.org/programs/hpd/pdf_0901_edintro.pdf), download Nopember 2005.

Lin, N, Karen Cook, and Ronald S. Burt (eds). 2001, *Social Capital - Theory and Research*, New York, Aldine De Gruyter.

Pariela, Tonny D. 2008, *Damai di Tengah Konflik Maluku - Preserved Social Capital Sebagai Basis Survival Strategy*, Disertasi Doktoral, Universitas Kristen Satya Wacana.

Policy Research Initiative, June 2003, *Concepts, Measurement and Policy Implications*, Social Capital Workshop, Report of Findings, [http://www.policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=pub\\_index](http://www.policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=pub_index), download Nopember 2005.

Productivity Commission. 2003, *Social Capital: Reviewing the Concept and Its Policy Implications*, Commission Research Paper, Commonwealth of Australia, <http://www.ala.asn.au/news/HumeEvaluationReportFinal2005.pdf>, download Oktober 2005.

Rose, R. November 1998, *Getting Things Done in an Anti-Modern Society: Social Capital Networks in Russia*, The World Bank Social Development. Family, Environ-

mentally and Socially Sustainable Development Network, Social Capital Social Capital Initiative, Working paper No. 6. <http://www.abdn.ac.uk/espp/rev.shtml>, download Oktober 2005.

Serageldin, Ismail and Christian Grootaert, *Defining Social Capital: An Integrating View* dalam Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin. 1999, *Social Capital - A Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washington D.C.

